

PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI WILAYAH MENUJU DESA MANDIRI STUDI PADA SUMBER HARAPAN KABUPATEN SAMBAS

Sumar'in

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Correspondensi author email: sumarinasmawi@gmail.com

ABSTRACT

The rural development paradigm that must be developed is aspirational development that prioritizes community participation and accommodates developing aspirations as the main factor in development planning and implementation. The independent village is the highest village status among the four other statuses, that independent village has an increasing level of community welfare and a low amount of poverty. The author in conducting field research (field research) with a qualitative descriptive analytical approach. The sample in this study is the village of Sumber Harapan. The conclusion of the study is that the Pontensi Desa Sumber Harapan that can be developed based on the analysis of the researcher includes 2 (two) aspects, namely the first aspect of weaving and the second aspect of agriculture and plantations.

Key Word: Economy, independent and village

ABSTRAK

Paradigma pembangunan perdesaan yang harus dikembangkan adalah pembangunan yang aspiratif yang mengutamakan partisipasi masyarakat dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang sebagai faktor utama dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Adapun Desa mandiri merupakan status desa tertinggi diantara empat status lainnya, bahwa desa mandiri memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan jumlah kemiskinan yang rendah. Penulis dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Sampel dalam penelitian ini adalah desa Sumber Harapan. Kesimpulan penelitian bahwa Pontensi Desa sumber Harapan yang bisa dikembangkan berdasarkan analisis peneliti meliputi 2 (dua) aspek yakni *pertama* aspek Kerajinan Tenun serta *kedua* Aspek Pertanian dan perkebunan.

Key Word: Ekonomi, mandiri dan desa

PENDAHULUAN

Desa memegang peranan yang strategis dalam proses pembangunan nasional. Disamping karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di perdesaan, juga karena pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan otonom sejak sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Melalui pemerintahan desa, masyarakat desa mengatur dan mengurus rumah tangganya, sesuai kebutuhan dan budaya setempat.

Akan tetapi, kebijakan pembangunan perdesaan yang dilaksanakan Pemerintah Orde Baru, mengakibatkan masyarakat desa dalam posisi marginal, hanya menjadi pengikut dan obyek semata. Sebagian besar kebijakan Pemerintah bernuansa “*top-down*”, dominasi Pemerintah sangat tinggi, akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan desa, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal. Berbagai keputusan umumnya sudah diambil dari atas, dan sampai ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang tidak bisa ditolak. Masyarakat hanya sekedar objek pembangunan yang harus memenuhi keinginan Pemerintah, belum menjadi subyek pembangunan, atau masyarakat belum ditempatkan pada posisi inisiator (sumber bertindak).

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan di setiap daerah. Berdasarkan aturan Undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan daerah agar setiap daerah otonom dengan kewenangan yang dimilikinya dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemerataan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (hukumonline.com). Secara sosiologis desa merupakan gambaran dari suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal di dalam suatu lingkungan dimana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung dengan alam. Komunitas masyarakat desa di atas kemudian berkembang menjadi kesatuan hukum dimana kepentingan bersama penduduk menurut hukum adat dilindungi dan dikembangkan, atau suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang mengadakan pemerintahannya sendiri (Kartohadikoesoemo, 2002).

Berbicara tentang pengembangan program pembangunan perdesaan, kegagalan penerapan program-program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralisasi dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Partisipasi saat itu lebih diartikan pada

bagaimana upaya mendukung program pemerintah dan upaya-upaya yang pada awal dan konsep pelaksanaannya berasal dari pemerintah.

Paradigma pembangunan perdesaan yang harus dikembangkan adalah pembangunan yang aspiratif yang mengutamakan partisipasi masyarakat dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang sebagai faktor utama dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Konsep pembangunan aspiratif tersebut, dapat ditempuh melalui suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, maka konsep pembangunan aspiratif mengandung tiga unsur penting yaitu peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan implementasi pembangunan, orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut, dan peran pemerintah sebagai fasilitator.

Hadirnya UU No. 6/2014 tentang Desa mengharuskan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam rangka memberikan percepatan dalam pembangunan desa. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa jumlah dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dari tahun ketahun terus meningkat. Tahun 2015 jumlah dana desa sebesar Rp 20,8 triliun, kemudian naik pada tahun 2016 mencapai Rp 46,8 triliun, tahun 2017 naik lagi mencapai Rp 60 triliun, dan tahun 2018 naik lagi menjadi Rp 111 triliun, sampai tahun 2019 akan mencapai Rp 113 triliun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga telah mencanangkan terwujudnya 2.000 desa mandiri pada tahun 2019.

Istilah desa mandiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata desa dan kata mandiri. Desa sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti sekelompok rumah di pedalaman yang membentuk suatu masyarakat, kampung, dusun, ataupun wilayah yang masuk dalam bagian kelurahan. Sedangkan kata mandiri menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti berdiri sendiri dalam arti tidak bergantung pada orang lain dalam mengerjakan sesuatu; tidak menyandarkan hidup pada orang lain karena sudah dapat berusaha sendiri.

Jika dilihat dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 11 Tentang Indeks Desa Membangun menyebutkan bahwa desa mandiri, atau bisa disebut sebagai desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Upaya memperkuat pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan ini, maka dikembangkanlah IDM (Indeks Desa Membangun) sebagaimana tertuang dalam Buku RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019, yakni mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri

sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan desa dan status perkembangannya. Indeks desa membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian target RPJMN 2015-2019.

Indeks Desa Membangun adalah Adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDTT. Dengan demikian hasil analisa IDM dalam penetapan status Kemandirian Desa akan dapat menjadi alat bantu pengintegrasian perencanaan.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Indikator yang tersedia dalam Podes dipilih yang dapat mewakili Faktor-Faktor penentu keberhasilan pembangunan wilayah; a) Ketepatan Peran Pemerintah dalam memilih intervensi pembangunan, b)Partisipasi Masyarakat terhadap intervensi pembangunan (perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemerliharaan) serta c)Karakteristik Wilayah (Tipologi dan Modal Sosial) masing-masing Desa, yang akan mengoptimalkan point a dan b. Secara konspional, apabila point a,b dan c masing-masing saling berkorelasi positif, maka dapat dipastikan dampaknya akan tercapai sesuai teori dan konsep kebijakan Tata Kelola program pembangunan sektoral dan atau bidang yang strategis terpilih yang secara teori pembanguan merupakan determinan faktor pada kemajuan Pembangunan pada; dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Lingkungan.

Selanjutnya untuk pemutakhiran Data Status Perkembangan Desa ini melibatkan beberapa pihak dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah (DPMD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional baik dari Tenaga Ahli Pendamping Provinsi (TA Provinsi), Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

Desa mandiri merupakan status desa tertinggi diantara empat status lainnya, dimana desa mandiri memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan jumlah kemiskinan yang rendah. Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai salah satu desa di Kabupaten Sambas hingga tahun 2019 ini merupakan desa yang memiliki status sebagai desa Maju. Status desa Maju yang diperoleh Desa Sumber Harapan per tanggal 27 Mei 2019 merupakan sebuah pencapaian yang sangat menggembarakan bagi Kabupaten Sambas. Besarnya potensi desa untuk dikembangkan menjadi desa mandiri, menjadi desa ini begitu menarik untuk diteliti dan dijadikan bahan kajian yang selanjutnya bisa dijadikan percontohan di Kabupaten Sambas. Peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian pada Desa Sumber Harapan, karena Desa ini merupakan cikal bakal yang bisa didorong untuk menjadi *icon* wisata dan identitas Kabupaten Sambas pada umumnya. Karena pada Desa ini berada di Kecamatan Sambas yang masih menjadi keasrian desa, dengan mayoritas masyarakat sebagai petani, terjaganya budaya lokal khususnya melayu, serta kreativitas masyarakat dalam melestarikan tenun sebagai produk lokal yang bernilai nasional bahkan internasional.

Ditetapkan Desa Sumber Harapan sebagai Desa wisata dengan potensi yang sangat beragam, mestinya mampu mendorong serta melakukan lompatan terhadap perekonomian masyarakat serta berdampak pada percepatan desa Sumber Harapan menjadi desa Mandiri. Dengan status Desa Sumber Harapan saat ini yang sudah mendapat status desa maju, menjadi modal tersendiri untuk pembengangan dan percepatan desa menuju desa Mandiri. Apalagi program pemerintah pusat dan daerah begitu kuat untuk mendorong beberapa desa melakukan lompatan tersebut dalam meningkatkan status desa.

Khusus untuk Kain tenun sambas yang dihasilkan oleh Desa Sumber Harapan tidak hanya dikenal di sekitar kecamatan dan kabupaten Sambas, melainkan juga dikenal oleh kabupaten lain dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat bahkan sampai ke negeri Jiran, Malaysia dan Brunai Darussalam. Sejumlah infrastruktur budaya menjadi prioritas pengembangan, industri kerajinan rakyat yang berkaitan dengan budaya lokal harus terus digali dan dioptimalkan.

MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan diatas, pengembangan potensi ekonomi desa menjadi salah satu solusi yang mampu dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan ekonomi dan mendorong percepatan desa dari desa maju menuju Desa Mandiri. Salah satu titik tekan dari pengembangan Ekonomi potensi ekonomi desa adalah penguatan dan pengembangan potensi Lokal dalam meningkatkan kreativitas dan nilai jual produk masyarakat. Selanjutnya menjadi sebuah *project* menarik untuk dijadikan *miniatur* dalam pengembangan potensi Ekonomi desa di Kabupaten Sambas, Desa Sumber Harapan menjadi kajian yang akan fokus pada pengembangan potensi desa

dalam mendorong desa menuju desa mandiri. Sehingga ditetapkan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Potensi ekonomi Desa Sumber Harapan?
2. Bagaimana upaya pengembangan Potensi ekonomi desa yang bisa dilakukan oleh Desa Sumber Harapan?

LANDASAN TEORI

Kemajuan ekonomi yang antara lain meliputi: akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi (Soleh, 2014). Untuk mengatasi berbagai kendala dan kompleksitas dalam masyarakat pedesaan dibutuhkan upaya dan strategi terintegrasi melalui pembangunan pedesaan.

Menurut Kusmawan (2015), ada beberapa dimensi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat desa. Pertama, dimensi kelembagaan pemerintah desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya. Semakin besar ketergantungan kelembagaan pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangannya, ini adalah bentuk ketergantungan yang negatif. Namun, semakin kecil ketergantungan kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya, ini adalah bentuk ketergantungan yang positif. Kedua, dimensi kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam upaya memajukan kondisi perekonomian. Semakin berjalan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat, kelembagaan ekonomi itu semakin mandiri. Namun, semakin tidak berjalan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat itu, berarti semakin tidak mandiri kelembagaan ekonomi tersebut. Ketiga, kelembagaan sosial masyarakat. Pada dimensi ini akan tergambar dengan jelas bagaimana fungsi-fungsi kelembagaan sosial ini berjalan. Berbeda dengan dua dimensi lainnya yang cenderung material, dimensi ketiga ini cenderung abstrak. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai universal dianut dan dijalankan oleh masyarakat dalam kelembagaan.

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan di setiap sektornya. Untuk melihat seberapa berhasilkah sebuah pembangunan maka perlu adanya tolok ukur dari indikator yang telah ditetapkan. Kemandirian suatu desa tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Seperti dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menggunakan 23 indikator, yaitu dilihat dari tingkat religiusitas, kemandirian, perkeekonomian, kondisi rumah dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan.

Kesejahteraan bukan satu – satunya tolok ukur suatu desa atau daerah itu maju. Selain melihat tingkat kesejahtraanya perlu adanya

indikator desa mandiri itu sendiri. Dengan adanya indikator tersebut maka akan lebih mudah dalam menilai apakah desa tersebut termasuk ke dalam desa mandiri atau bukan.

Diawali oleh pemikiran David C. Korten yang menyatakan pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*) adalah melihat inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber daya pembangunan utama dan melihat kesejahteraan mental dan spiritual masyarakat sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan, selanjutnya konsep pembangunan tersebut berkembang untuk mengisi kekurangan di mana pasar gagal memenuhi kepentingan sosial masyarakat dan institusi politik atau pemerintah juga gagal untuk menjalankan mandatnya dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Perspektif berbasis masyarakat ini sebelumnya telah memperoleh legitimasi dengan adanya publikasi pada tahun 1974 oleh Bank Dunia, yang merekomendasikan strategi pembangunan perdesaan difokuskan pada peningkatan akses bagi petani kecil dan pekerja pemilik lahan, air, pasar kredit dan fasilitas lain, yang dapat meningkatkan produktivitas mereka.

Tabel 1. Dua Paradigma Pembangunan

Dimensi	Berbasis pada Produksi	Berbasis pada Masyarakat
Logika	Ekonomi produksi (eksploitasi & manipulasi sumber daya alam)	Ekologi manusia yang seimbang
Tujuan	Pertumbuhan arus barang & jasa (peningkatan jumlah & kualitas barang & jasa)	Pertumbuhan manusia (Peningkatan potensi manusia)
Sistem Ekonomi	Konvensional (skala besar, spesialisasi, investasi, keunggulan komparatif, interdependensi global)	Swadaya (skala lokal, sistem ekologi manusia, interdependensi teritorial)
Birokrasi	Birokrasi besar (masyarakat diorganisasikan dlm sistem produksi yg efisien dg pengawasan terpusat)	Sistem swaorganisasi (satuan-satuan organisasi berskala manusia & komunitas-komunitas swadaya)
Kriteria	Memperhatikan kebutuhan sistem produksi (efisiensi, memaksimalkan laju kenaikan produktivitas sistem)	Memperhatikan kebutuhan masyarakat (nilai produk, partisipasi & mutu kehidupan kerja)
Teknik Sosial	Struktur formal, bentuk organisasi sistem komando; metode analisis keputusan bebas nilai & positivistik; pengetahuan dikembangkan	Informal, bentuk organisasi swadaya; peran individu dlm proses pembuatan keputusan dg nilai manusiawi sbg ukuran;

	berdasarkan perspektif fungsional; sistem produksi didefinisikan secara fungsional; perangkat analisis tidak mempertimbangkan manusia & lingkungan	pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif teritorial; pilihan2 produksi & prestasi didasarkan pd kerangka ekologi, yaitu melibatkan manusia & menempatkannya sbg proses analisis
Proses pembuatan keputusan	Sentralistis; didominasi para ahli (teknokrat); tidak konsultatif; kendali pada pejabat yg tdk menanggung akibat keputusan	Desentralisasi; rakyat berhak memasukkan nilai2 kebutuhan lokal dlm proses pembuatan keputusan; kendali pd rakyat yg hidupnya dipengaruhi oleh keputusan itu

Sumber : Korten & Sjahrir, 1988

Karakteristik utama konsep pembangunan berbasis masyarakat adalah sebagai berikut (Soleh, 2014):

- Penekanan pada lokalitas baik dalam pengertian kelembagaan, komunitas, lingkungan maupun kultur.
- Berimplikasi pada *transformatif and transactive planning, bottom up, community empowerment and participative*.

Konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya merupakan suatu bentuk perencanaan sosial dengan tujuan melakukan perubahan sosial yang terencana, yaitu perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat agar menjadi berdaya atau mampu melakukan pembangunan di lingkungannya dengan usaha sendiri secara kolektif. Berbagai pendekatan perencanaan pembangunan mendahului lahirnya pemikiran pendekatan atau strategi yang sering digunakan dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut, antara lain: perencanaan komunikatif dari Habermas, perencanaan transaktif dari Friedmann, perencanaan advokatif dari Davidoff, dan perencanaan kolaboratif dari Healey. Pendekatan-pendekatan perencanaan tersebut muncul untuk menjawab kebutuhan perencanaan yang diperlukan oleh berbagai lapisan masyarakat pada era pasca modernisasi/industrialisasi (*postmodern planning*). Berbagai pendekatan atau strategi pembangunan berbasis pemberdayaan yang dikenal saat ini antara lain pendekatan berbasis masyarakat (*people centre approach*) atau pendekatan partisipatif (*participatory approach*), dapat dikatakan sebagai pendekatan perencanaan pragmatik pasca modernisasi atau merupakan praktek dari teori-teori perencanaan komunikatif, transaktif, advokatif, dan kolaboratif. Pendekatan partisipatif terbaru menekankan akan pentingnya peran masyarakat sehingga para

fasilitator pendamping masyarakat tersebut harus berperan sedemikian rupa, misalnya antara lain tidak menggurui, agar segala sesuatunya yang terkait dengan pembangunan harus berasal dari masyarakat itu sendiri (Kusnaka dan Hikmat, 2003). Peran yang sulit untuk dijalankan, khususnya pada komunitas adat, terlebih bila mengingat masih terbatasnya pemahaman masyarakat tersebut akan pembangunan yang umumnya bersifat modern.

Menurut Tim Pengelola Hutan Bersama, melalui wawancaranya dengan beberapa responden merumuskan 16 indikator desa mandiri. Indikator tersebut dapat dilihat dari fasilitas yang ada di desa, tingkat kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan serta pemanfaatan sumber daya alam.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun menguraikan mengenai Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mewujudkan desa mandiri. Sebuah desa, dapat dikatakan desa mandiri apabila memiliki tiga indeks di dalamnya yakni indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi. Setiap indeks memiliki dimensi dan indikatornya masing-masing.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 butir 8 disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Seperti telah disebutkan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai implikasi signifikan paradigma pembangunan pedesaan karena pada tataran normatif pembangunan pedesaan harus benar-benar memberdayakan masyarakat desa dan mengembangkan institusi pedesaan atau berpihak dan berpusat pada desa itu sendiri. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa harus ditempatkan sebagai prioritas utama dan pertama. Pada tataran konseptual, pembangunan pedesaan menjadi tidak dipandang sebagai perubahan satu arah (*a single direction*) tetapi berdimensi ganda (ekonomi, politik, sosial dan kultural) karena itu pembangunan pedesaan tidak mengutamakan target tetapi lebih menekankan proses adaptasi yang terus menerus tak pernah henti. Di dalam proses ini terdapat dialog intensif antara masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Pada tataran empirik, kegiatan pembangunan pedesaan berhadapan dengan kondisi dan situasi desa yang beragam, kompleks dan penuh tantangan. Tendensi demikian terjadi karena persoalan desa tidak dapat dipersempit hanya berkisar pada persoalan perut, tetapi sebenarnya juga persoalan aspirasi, hak dan keadilan.

Kemudian pada tataran praktis, kegiatan pembangunan pedesaan bukanlah menggurui masyarakat desa, tetapi memberdayakan mereka. Pembangunan pedesaan adalah suatu proses yang berusaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat desa dibantu,

didampingi dan difasilitasi untuk melakukan analisis dan masalah yang dihadapi, untuk menemukan solusi masalah tersebut dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, menciptakan aktivitas dengan kemampuannya sendiri. Dengan pendekatan semacam ini, masyarakat desa diberi peluang memutuskan apa yang dikehendaki, dan inisiatif mereka kemudian menjadi basis program-program pembangunan pedesaan (Usman, 2015).

Pembangunan pedesaan pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dan percepatan pembangunan dengan menggali potensi sumber daya alam dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, dengan pola peningkatan pelayanan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan diperoleh pencapaian tingkat kemandirian yang tinggi di daerah (Soleh, 2014).

Istilah kemandirian (*resilience*) sering dipersamakan dengan istilah otonom, tidak tergantung atau bebas, mengelola diri sendiri dan keberlanjutan diri. Sedangkan suatu masyarakat (*community/society*) terdiri dari person-person dalam wilayah tertentu, memiliki satu atau lebih ikatan bersama dan saling berinteraksi sosial (Hillery, 1995). Dalam perspektif pembangunan masyarakat, kemandirian masyarakat merupakan suatu keadaan atau kondisi tertentu yang ingin dicapai seorang individu atau sekelompok manusia yang tidak lagi tergantung pada bantuan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya (Verhagen, 1996). Kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar (pemerintah) yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Untuk itu apabila masyarakat diberi bantuan dana, maka bantuan itu perlu disikapi sebagai stimulasi atau memotivasi untuk membangun diri, membelajarkan diri, serta membangun prakarsa inisiatif secara mandiri. Untuk itu, pengembangan kemandirian merupakan bentuk perubahan sosial diri manusia dari situasi tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ketercapaian partisipasi masyarakat menghasilkan kondisi kemandirian dengan karakteristik (Bell dan Morse, 2008) yaitu ;

1. memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung, mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensinya, menyelesaikan masalah yang dihadapi, secara ekonomi mampu menghasilkan (produksi dan pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat melakukan kontrol dalam masyarakat,
2. memiliki tanggung jawab kolektif yaitu adanya pengembangan kerjasama dan kemitraan antar warga masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan

- pengembangan jaringan sosial untuk mengakses berbagai peluang,
3. memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan yaitu menjaga kualitas lingkungan sistemik dan memelihara pelayanan dan sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Ukuran terwujudnya kemandirian masyarakat merupakan hasil pencapaian partisipasi masyarakat. Menurut Korten (2001) dapat ditambahkan bahwa, dalam perspektif pembangunan berorientasi pada rakyat, untuk membangun kemandirian masyarakat perlu dikembangkan gerakan masyarakat. Gerakan itu dimaksudkan sebagai upaya menggerakkan sebuah masa kritis secara terorganisasi dalam berpartisipasi masyarakat yang penuh dengan inisiatif, tidak tersentralisir, dan mandiri sehingga keadilan, keberlanjutan dan kecukupan (Agusta, Tetiani & Fujiartanto, 2014).

Pembangunan dimaknai sebagai perubahan sosial yang diharapkan. Dimensi perubahan sosial meliputi adanya kondisi awal, terdapat kondisi akhir yang diinginkan, serta dimensi waktu dimana perubahan berlangsung diantara dua titik waktu tersebut. Kondisi awal yang diukur adalah kumulasi potensi atau tingkat kemandirian desa saat ini. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai indikator eksisting desa yang berkaitan dengan potensi sosial, ekonomi dan pemerintahan. Kondisi akhir yang diinginkan ialah visi kemandirian desa sebagaimana tercantum dalam berbagai Peraturan Perundangan dan kebijakan di Indonesia. Visi tersebut ialah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pembangunan dari dimensi waktu diukur menurut dua sub dimensi. Pertama, mengukur tingkat pembangunan baru sebagai hasil dari intervensi pembangunan. Ukuran tingkat pembangunan ini diorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Kedua, mengukur kecepatan atau laju kemandirian desa. Ukuran laju ini merujuk pada tingkat produksi wilayah. Dengan demikian indeks kemandirian desa (IKD) mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan umum. Konstruk yang disusun untuk kesejahteraan umum meliputi, ekonomi masyarakat atau standard material, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, lembaga kemasyarakatan atau modal sosial, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat atau pemerintahan, peranserta masyarakat dalam pembangunan, dan peran swasta untuk peningkatan daya saing. Dimensi-dimensi ukuran indeks kemandirian desa (IKD) meliputi pertama, pengukuran tingkat pembangunan pedesaan, kedua pengukuran laju pembangunan pedesaan. Ketiga, pengukuran keragaman pedesaan (atribut pembangunan desa). Guna meningkatkan sistematika pengukuran kemandirian desa, maka indeks kemandirian desa disusun menurut model evaluasi. Model umum evaluasi pembangunan dimulai dari penyusunan visi dan misi pembangunan. Kegiatan pembangunan

dapat ditunjukkan oleh masukan (*input*), yang dikerjakan dalam suatu pelaksanaan kegiatan (*process*), sehingga menciptakan hasil pembangunan (*Output*). Masyarakat yang menggunakan hasil.

Indeks kemandirian desa (IKD) mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan umum. Konstruk yang disusun untuk kesejahteraan umum meliputi: 1) Ekonomi masyarakat atau standard material; 2) Pendidikan masyarakat; 3) Kesehatan masyarakat; 4) Lembaga kemasyarakatan atau modal sosial; 5) Lingkungan hidup; 6) Keamanan dan ketertiban; 7) Kedaulatan politik masyarakat atau pemerintahan; 8) Peranserta masyarakat dalam pembangunan; 9) Peran swasta untuk peningkatan daya saing (Agusta & Fujiartanto, 2014).

Desa bukan obyek pembangunan, melainkan subyek yang bisa mandiri, termasuk mendesain sektor pembangunan mana yang paling prioritas bagi sebuah desa. Tugas Negara terbatas pada penyediaan alokasi dana dan berbagai standard, sementara tugas membangun diserahkan kepada desa (Hasani, 2015). Meskipun desa membangun buka paradigma baru, karena sebelumnya telah menjadi praktik di desa-desa di beberapa wilayah, Undang-Undang Desa telah menjadi spirit baru pembangunan pedesaan.

Paradigma pembangunan yang menempatkan peran sentral pemerintah sebagai titik pusatnya, juga tidak sepi dari kritik, karena aparat pemerintah yang semula diasumsikan sebagai faktor pendorong utama dalam proses pembangunan, belakangan diketahui malah sebagai faktor pengganggu atau penghambat pembangunan (Sutrisno, 135). Persoalannya adalah bagaimana mewujudkan kemandirian desa? Alternatif yang kemudian ditawarkan berkenaan dengan kecaman atau kritik tersebut adalah paradigma pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Paradigma pemberdayaan lahir dari suatu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya manakala masyarakat diberikan kepercayaan berupa hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan mempergunakan untuk membangun masyarakatnya (Soleh, 2014).

METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam dengan cara kualitatif. Bahwa penelitian ini bersifat atau memiliki karakteristik sesungguhnya yang terjadi di lapangan, dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dipilihnya Desa Sumber Harapan dilakukan secara sengaja karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Desa Sumber Harapan saat ini adalah salah satu desa yang mempunyai status Desa Maju di Kabupaten Sambas yang patut untuk dikaji dan dikembangkan potensinya. Desa Sumber Harapan merupakan Desa Wisata yang telah

ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Selain itu Desa Sumber Harapan merupakan tempat kerajinan kain tenun sambas yang pertama dan masih bersifat tradisional serta mempunyai kualitas terbaik jika dibandingkan dengan desa lainnya di Daerah Sambas. Di Desa ini pula potensi ekowisata, potensi budaya dan potensi ekonomi lainnya sangat layak untuk dikembangkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, sehingga menjadi *icon* desa di Kabupaten Sambas pada umumnya.

Desa ini cukup berhasil dalam mengembangkan industri kecil kain tenun sambas; tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas cukup tinggi terhadap pengembangan industri kecil kain tenun sambas; di lokasi penelitian banyak terdapat tenaga kerja produktif yang tidak mempunyai pekerjaan tetap; letak desa ini selain dekat dengan kabupaten dan kota juga berdekatan dengan perbatasan Negara Malaysia khususnya Sirikin yang jaraknya kurang lebih 60 Km dari Kuching (Sarawak). Selanjutnya untuk mem-perkaya nuansa data kualitatif dalam penelitian ini, peneliti memilih situs penelitian didasarkan atas kondisi dalam pengumpulan data yang dimulai dari keinginan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dirinya, bentuk, proses dan strategi pemberdayaan serta peran aktor dalam memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan potensi lokal. Situasi dan suasana pengumpulan data juga diperoleh di pemukiman warga, kantor desa, kantor camat, dinas instansi terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bahwa dalam jenis penelitian seperti ini jumlah sampel tidak dipermasalahkan dan ketika sudah terdapat pengulangan jawaban terhadap berbagai jawaban yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, maka tidak perlu lagi mencari respon lain untuk di wawancarai. Sehingga teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti cenderung dengan teknis *snowball sampling*. Adapun jumlah respon yang telah tim peneliti wawancarai dalam menjawab masalah ini adalah sebanyak 21 orang yang terdiri dari 5 orang Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Sambas. 7 orang perangkat desa yang terdiri dari kepala Desa, Kaur, Kasi dan Kepala Dusun di 3 Dusun Sumber harapan serta 10 orang masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, para penenun dan wira usaha. Peneliti beranggapan dari hasil wawancara yang telah dilakukan data yang diperoleh sudah sangat komprehensif untuk dijadikan sebagai bentuk hasil penelitian.

Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yakni data primer dan sekunder. Data yang bersifat primer dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari hasil observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi. Hasil dari data tersebut dijadikan sumber primer oleh peneliti karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Sedangkan data yang bersifat sekunder adalah yang diambil dari tulisan-tulisan atau buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan tema atau teori yang diteliti. Terutama buku-buku, penelitian dan laporan serta jurnal yang berhubungan dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah Menuju Desa Mandiri.

1. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Interview

Adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan-informan.

b. Observasi

Sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mendatangi Kantor Desa Sumber Harapan, juga pada pengusaha dan pengrajin serta daerah Desa Sumber Harapan.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data yang terdapat dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian untuk dapat mengumpulkan teori-teori yang merupakan variabel terpenting dalam penelitian ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan pendukung yang terkait dengan kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah Menuju Desa Mandiri.

2. Analisis Data

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Analisis dapat dibedakan atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris), maka yang digunakan adalah analisis kualitatif (Priadana dan Muis, 2009). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono, (2011: 338) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.

Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa proses reduksi data telah peneliti lakukan mulai dari penetapan fokus penelitian, menentukan pertanyaan untuk membatasi fokus penelitian, menetapkan lokasi penelitian, kerangka konsep pembahasan hingga pemilihan teknik pengumpulan data.

Setelah data penelitian terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan antara hal-hal yang pokok dengan yang bukan hal pokok, dan membuang data-data yang tidak diperlukan dijadikan arsip sehingga apabila ada keperluan pengecekan data asli dapat dicarikan kembali.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 341) menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Berdasarkan keterangan di atas, *display* data dalam penelitian ini yaitu dengan penyajian data melalui ringkasan-ringkasan penting dari data-data yang telah direduksi. Artinya data yang telah dirampingkan melalui reduksi data, selanjutnya dipilah lagi untuk disajikan sebagai data atau temuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/ Verification*)

Menurut Sugiyono, (2011: 345) kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

Setelah analisis dilakukan, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan pada fokus penelitian. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan dan melakukan cek ulang terhadap data-data yang terkumpul sejak proses pengumpulan data dilakukan hingga tahap perumusan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan dan rumusan yang tidak relevan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.

A. Analisis dan Pembahasan

1. Potensi Ekonomi Desa

Memetakan Potensi ekonomi desa, harus didasarkan pada karakteristik desa dan kondisi desa. Karena 2 hal ini adalah hal yang paling mencerminkan desa. Artinya hal terpenting yang harus dilihat dalam melihat potensi desa Sumber harapan harus tercermin dari kondisi dan karakteristik desa itu sendiri. Dari gambaran inilah nanti akan tergambar potensi desa yang selanjutnya dapat dimaksimalkan menjadi kekuatan desa.

Masyarakat Desa Sumber Harapan merupakan masyarakat penduduk Asli setempat dengan total jumlah penduduk mencapai

2.766 jiwa dan luas desa 2.256 km² yang sebagian besar Penduduk merupakan suku Melayu dengan tingkat persentasi mencapai 95%, diikuti dengan masyarakat Suku keturunan Tionghua sebesar 5%, Adapun penganut agama sebagian besar adalah penganut agama Islam yakni sebesar 95 %, sisianya 2,5% Penganut Khong Phucu dan 2,5% beragama Kristen.

Adapun lulusan sekolah dan tamatan pendidikan untuk wilayah Desa Sumber Harapan menunjukkan bahwa penduduk Desa Sumber Harapan sebagian besar adalah adalah Tamat SMA yakni sebesar 35%, sisanya Tamat SMP 30%, Tamat SD sebanyak 22%, Perguruan Tinggi 6%, tidak tamat SD/ tidak sekolah sebesar 7%. Masih ditemukannya sebagian warga yang tidak tamat sekolah menjadi salah satu catatan yang harus diatasi untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Desa Sumber Harapan.

Terkait masalah budaya, masyarakat desa Sumber Harapan sebagaimana masyarakat melayu sambas pada umumnya, budaya masyarakat banyak dipengaruhi budaya Islam khususnya melayu Islam, karena masih kentalnya adat-istiadat yang dianut masyarakat, seperti Zikir Nazam maupun zikir Maulud dalam acara perayaan kelahiran atau acara pernikahan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari seperti acara pesta perkawinan masih menggunakan adat budaya Melayu.

Perputaran ekonomi di Desa Sumber Harapan masih terbilang lambat, hal ini daya dukung Pasar Desa belum ada sehingga akses ekonomi dan perputaran uang masih harus mencari ke daerah lain khususnya wilayah kota Sambas, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat berbelanja pada warung-warung kecil di setiap kampung atau Dusun. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa belum mencukupi maka perlu diadakan penambahan sarana dan prasarana mengingat jumlah penduduk 2.766 jiwa dan luas desa 2.256 km². Berdasarkan data dari pihak pemerintah desa jumlah pengrajin tenun di desa Sumber Harapan dari waktu ke waktu juga terus bertambah. Sampai akhir tahun 2019, hasil survei pemerintah desa menunjukkan jumlah penenun di desa Sumber Harapan sebanyak 277 orang dengan jumlah alat produksi tenun mencapai 432 unit.

Dorongan dan dukungan pemerintah daerah, maupun pihak-pihak luar seperti PT. Garuda Indonesia, Yayasan Dompot Umat dan pihak lainnya, dianggap sangat mendukung kemajuan usaha tenun di Desa Sumber harapan. Hal ini terlihat semakin berkembang dan bertambahnya pengrajin-pengrajin tenun yang ada di Desa Sumber Harapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengrajin juga menjelaskan bahwa kesuksesan dan kebesaran tenun saat ini juga tidak lepas dari promosi, pembinaan dan pendampingan semua pihak.

Tenun Sambas atau Tenun Songket merupakan hasil kerajinan tangan dan kebudayaan masyarakat sambas yang di Pusatkan di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas. Hampir sebagian besar masyarakat yang berada di Desa ini menggeluti dunia

tenun, salah satunya yaitu Masyarakat Dusun semberang I dan semberang II dan hampir 99 % setiap rumah memiliki satu alat perumahan tenun dan orang yang mengerjakannya rata-rata ibu rumah tangga, anak muda, bahkan orang lelaki juga.¹

Dengan di gagasnya desa Sumber Harapan sebagai Desa Wisata budaya di Kecamatan Sambas, ditambah dengan potensi-potensi lain yang ada di Kecamatan Sambas khususnya di Desa Sumber Harapan seperti wisata agro, wisata sungai serta aspek-aspek lain yang bisa dioptimalkan, sehingga mampu mendorong perekonomian masyarakat desa Sumber Harapan. Untuk mengembangkan lebih jauh potensi yang ada di desa sumber harapan (Kusma:2019) masyarakat harus lebih mengembangkan kreatifitas. Masyarakat Desa Sumber Harapan ini memiliki prinsip tersendiri dalam mengembangkan potensi yang ada. Prinsip yang dimaksud yaitu kerja keras masyarakat, pengalaman usaha UKM khususnya pengrajin tenun, ketersediaan tenaga kerja lokal dan keterampilan masyarakat.²

Kerja keras pengusaha merupakan unsur penting dalam perkembangan dan pembangunan desa dalam menuju Desa Wisata Budaya. Baik pengusaha, pengrajin sonket dan masyarakat desa pada umumnya di Sumber Harapan merupakan masyarakat yang mempunyai etos kerja yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari perkembangan industri kain tenun, yang dulunya hanya dipakai oleh masyarakat setempat sekarang sudah dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia bahkan ke luar Negeri. Kain tenun sudah dipasarkan ke Malaysia dan Brunai Darussalam. Bahkan ada yang menjadi langganan tetap untuk menyuplai kain tenun ke Brunai Darussalam setiap bulannya. Bahkan masyarakat yang berada di dusun semberang I dan semberang II banyak yang menyuplai kain-kain untuk dibawa ke Brunai setiap bulannya dan banyak pengusaha kain tenun yang memperkerjakan masyarakat. Hanya saja dalam pengembangannya masyarakat di desa Sumber Harapan memiliki kelemahan terkait mengenai rendahnya inovasi dan kreatifitas, keterbatasan modal, belum ada manajemen, penguasaan pasar masih kurang dan rendahnya mental wirausaha serta kurangnya SDM.

Masyarakat Desa Sumber Harapan membangun desa menjadi desa Wisata Budaya dengan modal Kerajinan kain tenun di Desa Sumber Harapan hanya terpaku pada produk berupa Kain, selendang dan Sabuk. Setelah mengikuti perkembangan zaman akhirnya keluar inovasi dan kreatifitas masyarakat untuk membuat produk-produk terbaru seperti Tas, handbag, tempat tisu, gantungan kunci, kopiah, tanjak, List, syal, dompet, dan lain-lain yang mulai populer dipasaran. Masyarakat Desa Sumber Harapan memanfaatkan kain-kain sisa sehingga menghasilkan produk yang laku untuk dijual. Tahap pembuatan Kain Tenun melalui proses cual, menghani, dan ngubung

¹ DRS. Heri Kusnadi. Desa Sumber Harapan. 2020

² Kusma. Sentra Tenun. 2020

dengan berbahan dasar Dari Benang. Sedangkan perumahan Tenun sendiri dari bahan dasar kayu pilihan seperti kayu pidaru dan kayu belian. Untuk membuat Gigi Suri nya terbuat dari bahan pelepah batang Kolang-kaling atau disebut dengan ANAU (Rahmat:2019). kini suri yang digunakan masyarakat sudah ada dua jenis Yaitu gigi suri dari Anau dan gigi suri dari Besi.³

Potensi ini di jadikan sebagai desa wisata tenun, suatu kebanggaan yang diberikan oleh pemerintah sambas yang di rancang oleh bupati sambas pada masa Juliarti Djuhardi Alwi, dengan adanya tujuan untuk memberikan peluang dan potensi yang ada serta pengunjung bisa melihat secara langsung proses pembuatan kerajinan tenun songket dari awal sampai akhir dan di dukung dengan pembentukan kelompok pengrajin tenun bergabung bekerja sama dengan CTI (citra tenun indonesia). Masyarakat di dusun semberang I menjadikan profesi pengrajin tenun sebagai pemenuh kebutuhan hidupnya dengan berpegang pada ilmu yang di pelajarnya secara turun temurun. Kelompok yang beranggotakan 32 orang diberi nama SENTRA TENUN dan tempatnya berada dikawasan Dusun Semberang I. ⁴

Peranan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada masyarakat seperti dalam kegiatan di bidang wisata maka kontribusi yang sangat besar dalam bidang wisata adalah dengan membuat tenun yang berada di desa sumber harapan dengan di dukung oleh CTI (Citra Tenun Indonesia). Berdasarkan hasil wawancara kami di rumah kepala dusun semberang I menunjukkan bahwa pemerintah sangat berperan dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya di bidang wisata. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, SDM sebagai aparat pelaksanaan seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lainnya. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan Desa Sumber Harapan. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan.

Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip – prinsip pengelolaan antara lain:

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat
2. Menguntungkan masyarakat setempat
3. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat
4. Melibatkan masyarakat setempat

³ Rahmat. Pembuat Alat Tenun. 2020

⁴ Itin. Sentra tenun. 2020

5. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan, dan beberapa kriteria yang mendasarinya.

Selain itu saat ini Pemerintah Desa Sumber harapan sudah mendirikan BUMDesa sejak tahun 2017. Awal pendirian BUM Desa diharapkan mampu untuk memperkuat Desa menuju desa mandiri. Strategi penguatan ekonomi desa melalui BUM Desa, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah. BUM Desa, merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi Pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang strategis di desa. Selain itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUM Desa diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan.

Namun demikian hadirnya BUM Desa di Desa Sumber Harapan tidak terlalu maksimal peran dan keberadaannya hal ini tampak dari sepihnya aktivitas dan kegiatan di BUM desa tersebut. Bahkan berdasarkan hasil temuan dilapangan juga menunjukkan kantor BUM Desa sering tutup dan belum ada laporan kegiatan usaha dari BUM Desa pada pemerintah Desa maupun BPD selaku pemilik modal terbesar.

Berdasarkan analisis peneliti paling tidak terdapat 6 potensi utama pengembangan desa Sumber Harapan dalam penguatan ekonomi desa meliputi:

1. Optimalisasi Pengembangan Kerajinan tenun
2. Pengembangan Usaha pertanian Rakyat
3. Pengembangan Usaha Konveksi dan Kerajinan Jahit
4. Penguatan BUM Desa
5. Pengelolaan Desa Menuju Desa Wisata Budaya Tenun dan
6. Pengelolaan Penguatan Desa Menuju Desa Agro Wisata

Besarnya potensi desa yang ada di Desa Sumber Harapan ini harus dikembangkan mengingat potensi desa sangat perlu penanganan serius. Bahwa tipe pengembangan yang paling dibutuhkan dalam pengembangan desa ini adalah dengan model pemberdayaan.

Pemberdayaan mempunyai arti memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta

ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

2. Analisis Indeks Desa Membangun Sumber Harapan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari tahun 2015-2019 mulai melakukan program-program yang lokus utamanya lebih kepada prioritas pembangunan desa yang tadinya tidak berdaya atau kurang berdaya untuk menjadi berdaya. Program Nawacita sebagai teknisi penggerak undang-undang desa no 6 tahun 2015 yang juga telah diadopsi penuh menjadi *Agenda Pembangunan Nasional* dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah bukti keseriusan pemerintah dalam membangun desa, mengentaskan kemiskinan masyarakat desa serta menjadikan desa sebagai desa yang mandiri dan berdikari. Ada 3 pendekatan yang diambil oleh Kementerian Desa, PDTT untuk mendorong desa semakin lebih cepat dalam melaksanakan pembangunan. Tiga pendekatan inilah yang kemudian menghasilkan tiga kategori dalam melakukan penilaian keberhasilan program pembangunan desa atau yang disebut dengan indeks Desa Membangun (IDM) yaitu indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi (lingkungan).

1. Indeks Ketahanan Sosial

Berdasarkan hasil analisis data di Desa Sumber Harapan dihasilkan bahwa sebagian nilai Indeks desa Sumber harapan pada klasifikasi maju. Jika kita cermati poin IKS Desa Sumber Harapan sebesar 0,771. Berdasarkan grafik IKS dapat disimpulkan bahwa dari poin IKS di Desa Sumber Harapan merupakan point yang masih perlu untuk ditingkatkan. Nilai ini hanya memberikan kontribusi sebesar sebesar 33,2% dari indesk total IDM artinya. Artinya sebagian ketahanan sosial desa di sumber harapan berada dalam kalsifikasi yang baik namun masih sangat perlu ditingkatkan.

Hal ini juga didukung dari pernyataan dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa perangkat desa dan masyarakat desa Sumber harapan. Dari wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat dan disertai dengan hasil observasi peneliti menunjukkan perlunya peningkatan untuk menuju desa Mandiri.

Terdapat ada beberapa catatan dalam upaya meningkatkan kualitas dan indeks ketahanan sosial. Dalam hal Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Desa Sumber Harapan perlu untuk diperhatikan, yaitu keberdayaan masyarakat untuk kesehatan seperti Akses ke Poskesdes, Polindes atau Posyandu. Meskipun sampai saat ini fasilitas Desa Sumber Harapan memiliki 1 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 1 Pos

Persalinan Desa (Polindes) dan 3 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan 1 dokter, 3 mantri, dan 6 dukun bayi. Untuk dimensi Pendidikan di Desa Sumber Harapan Indikator Akses Pengetahuan Masyarakat dan Akses Pendidikan Non Formal masih sangat Rendah ini dibuktikan dari Tidak Tersedianya Taman bacaan masyarakat, tidak adanya kegiatan PKBM dan Kegiatan Kursus. Perpustakaan hanya milik Sekolah umum di tingkat SD dan SMP. Sementara desa belum ada upaya dan belum ada pembicaraan untuk membuat perpustakaan Desa. Akses SMA/SMK/MA sangat jauh >6KM. Tingkat Pendidikan Sebagian Besar Masyarakat Desa Pangkalan Bemban adalah Tamat SMA.

Pada Dimensi Permukiman ditemukan ; Akses Internet untuk warga desa dan kantor desa masih minim. Meskipun menurut pengakuan perangkat desa ada upaya untuk meningkatkan akses internet di Kantor desa di tahun 2019 ini yang bekerjasama dengan pihak Indosat. Begitu juga dalam hal akses warga terhadap Air Mandi dan Mencuci serta Sumber Air layak Minum masih sangat Minim/Rendah. Sumber Air Minum dan Mandi Cuci warga adalah dari Air Tadah Hujan, Sumur dan Sungai. Tempat pembuangan sampah/limbah warga masih dilakukan di Parit/Selokan/Drainase sebab belum ada Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Pada dimensi Modal Sosial, indikator Toleransi masih sangat rendah ini dilihat dari frekwensi karena keragaman suku/etnis maupun bahasa sehari-hari warga Desa masih sangat kental dan belum banyak budaya luar yang masuk. Keragaman dan pembauran masyarakat masih dianggap sangat kurang karena hidup mengelompok etnis tertentu yang ditunjukkan dari pola kehidupan masyarakat. Baik etnis melayu maupun etnis tionghoa. Perlunya Partisipasi masyarakat untuk menciptakan rasa aman bagi warga Desa. Rasa aman masih perlu ditingkatkan, utamanya dilingkungan terkecil masyarakat. Perlu dicatat bahwa trauma yang terjadi pada kasus perkelahian warga yang melibatkan kelompok tertentu tahun 2015, merupakan sebuah stigma yang harus dihilangkan. Sehingga sekarang terus diupayakan timbulnya semangat kebersamaan, kekeluargaan dan rasa aman ditengah masyarakat.

2. Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Ekonomi dalam memberikan gambaran dengan memperhitungkan indikator-indikator ekonomi yang ada di desa seperti jumlah industri, keragaman produksi ekonomi desa, jumlah pasar, toko, warung, Bank , Koperasi Desa atau Bumdes, lembaga ekonomi lain, modal transportasi, keterbukaan wilayah dan kualitas jalan.

Dari grafik indeks ketahanan ekonomi pada khusus untuk desa Sumber harapan menunjukkan poin sebesar 0,617. Poin IKE

ini hanya memberikan kontribusi sebesar 26,5% dari total IDM desa Sumber harapan. Artinya indeks ini adalah indeks terendah dan sangat perlu perhatian serius dalam meningkatkan status desa. Dari Indeks ini nilai IKE sesungguhnya menggambarkan nilai yang masih rendah, dengan nilai kurang dibawah 7. Hal ini memberikan gambaran rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan perlunya upaya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Adanya kesenjangan ketahanan ekonomi ditengah masyarakat. Masih terbatas dan jauhnya masyarakat desa mengakses pasar dan pusat ekonomi menjadikan nilai Indeks IKE ini rendah.

Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi masyarakat yaitu padi, Jeruk, Sawit, Karet dan sahang. Namun demikian dari banyaknya sumber pendapatan tersebut belum mampu untuk meningkatkan akses dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, belum ada pertokoan dan pasar desa, belum ada akses distribusi logistik, belum terdapat lembaga keuangan dan akses fasilitas kredit masih terbatas sedangkan BUMDESA sudah terbentuk di Tahun 2017. Meskipun demikian Bumdesa yang diharapkan mampu menggerakkan sector usaha masyarakat ternyata belum juga maksimal dan bisa berdaya.

3. Indeks Ketahanan Ekologi

Desa Ekologi adalah sebuah sistem kelola wilayah pedesaan yang terpadu dan melibatkan seluruh pihak baik dalam proses tata kuasa, kelola, produksi, dan konsumsi. Dalam perspektif ekologi, hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara seluruh komponen ekosistem harus dipertahankan supaya stabil dan seimbang (*homeostatis*). Maka Desa Ekologi atau Wilayah Kelola Rakyat sebagai sebuah pendekatan penting bagi upaya perbaikan pengelolaan desa sebagai pendukung utama pembangunan nasional.

Dalam perhitungan nilai indeks ketahanan ekologi, indikator yang diambil secara garis besar memuat (3) tiga kategori yakni Kualitas Lingkungan, Tingkat Kerawanan Bencana dan Respon/Tanggap Bencana. Kualitas Lingkungan dilihat dari tingkat pencemaran air, udara, tanah, dan limbah. Tingkat Kerawanan Bencana dilihat dari frekuensi bencana banjir, longsor dan kebakaran (kekeringan) yang terjadi dalam 1 tahun, sedangkan Respon Tanggap Bencana berkaitan dengan ada tidaknya peringatan dini, Perkap Keselamatan, jalur evakuasi dan mitigasi bencana.

Desa Sumber Harapan Terkait dengan Indikator Ketahanan Lingkungan Desa mempunyai skor paling baik dan sudah menggambarkan poin diatas 9, yakni 0,933. Selain itu nilai ini juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mendorong nilai IDM desa Sumber harapan yakni sebesar 40,2%,

artinya tingkat IKL desa sumber harapan bisa dijadikan sebagai contoh dan model pengembangan IKL desa bagi desa lainnya.

Bahwa Desa Sumber Harapan sudah ada Perencanaan Tata Ruang dan terdapat perubahan penggunaan Lahan dari Pertanian menjadi non pertanian. Organisasi sosial terkait tentang kepeludian wisata di Desa sesungguhnya juga sudah dibentuk Pokdarwih (Kelompok Sadar wisata) yang diketahui oleh Mutiah. Bahwa organisasi ini mulai menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan lingkungan pada masyarakat. Program yang dilakukan oleh kelompok ini sangat mendukung keasrian desa, dan bersifat sosialisatif.

Fasilitas antisipasi pemadam kebakaran seperti pompa air, baju dan sudah tersedia. Hingga saat ini pihak desa terus mempersiapkan tim pemadam kebakaran, atas bantuan CSR perusahaan sawit Mulya Indah dan Sarana Esa Cita (MI & SEC) di tahun 2017, karena pabrik pengolahannya berada di Dusun Semberang II Sumber harapan.

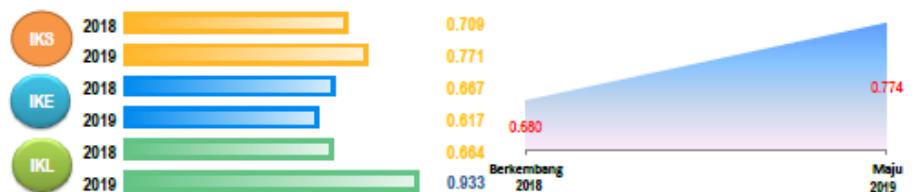
Terkait dengan ketersediaan air bersih pemerintah Desa hingga saat ini terus mengupayakan penyediaan air bersih pada masyarakat. Utamanya melalui bantuan dan penganggaran dari Dana desa. Di tahun 2018 pihak pemerintah Desa mendapatkan bantuan dari dinKes untuk menyaring air sungai menjadi air layak minum sebanyak 15 buah dengan rincian masing-masing RT mendapatkan 1 alat diletakkan di pinggir sungai.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data terkait tentang Komposit IDM desa Sumber Harapan Tahun 2019;

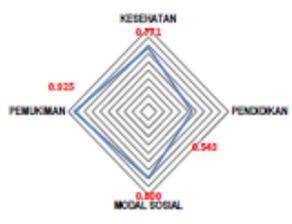
KOMPONEN INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2019



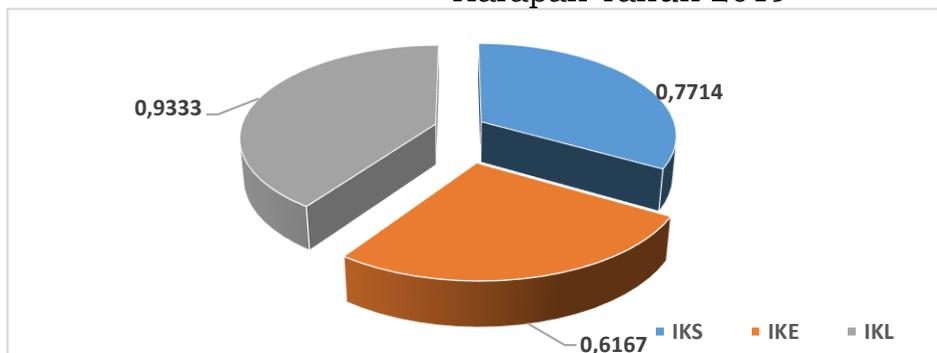
DESA : SUMBER HARAPAN
KECAMATAN : SAMBAS
KABUPATEN : SAMBAS
NILAI IDM 2018 : 0.6800
NILAI IDM 2019 : 0.7738
STATUS 2019 : MAJU



INDEKS KOMPOSIT	DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PERITEM	EXISTING DARI INDIKATOR UMUM	KEWENANGAN
SOSIAL (IKS)	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan	Jarak ke sarana kesehatan terdekat	1.00	Dinkes/ PUPR
			Ketersediaan Tenaga Kesehatan (bidan, Dokter dan Nakes Lain)	1.00	Dinkes
		Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan	Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu	0.20	Dinkes/ PUPR
			Tingkat Aktivitas Posyandu	1.00	Desa/ Dinkes
	PENDIDIKAN	Akses Pendidikan Dasar-Menengah	Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM	1.00	Disdik
			Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM	1.00	Disdik
			Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM	0.20	Disdik Provinsi
		Akses Pendidikan Non Formal	Kegiatan PAUD	1.00	Desa/ Disdik
	MODAL SOSIAL	Solidaritas Sosial	Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	0.20	Desa/ Disdik
			Kegiatan Kursus	0.20	Desa/ Disdik/ Disnakertrans
		Toleransi	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	0.20	Desa/ Disdik/ Arpusda
			Kebiasaan Gotong Royong	1.00	Desa
	Rasa Aman Warga Desa	Kesejahteraan Sosial	Keterbukaan Ruang Publik	1.00	Desa/ Diskominfo
			Terdapat Kelompok Olahraga	0.20	Desa/ Disporapar
		Toleransi	Terdapat Kegiatan Olahraga	0.80	Desa
			Keragaman Suku/Etnis di Desa	0.20	Desa
	Kesejahteraan Sosial	Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa	Bahasa Sehari-hari Warga Desa	0.20	Desa
			Aqama Mayoritas Warga Desa	1.00	Desa/ Kemenag
	Akses Air Bersih dan Layak Minum	Akses Air Bersih dan Layak Minum	Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa	1.00	Desa/ Kesbangpolinmas
			Partisipasi Warga Siskamling	1.00	Desa
Akses ke Fasilitas Sanitasi		Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak Minum	Kejadian Perkelahian Massal di desa	1.00	POLRI
			Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak Minum	0.80	Desa/ Perkim LH/ Dinkes
Akses ke Fasilitas Sanitasi	Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak Minum	Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci	0.80	Desa/ Perkim LH/ Dinkes	
		Mayoritas Warga Memiliki Jamban	1.00	Desa/ Perkim LH/ Dinkes	



Berikuti ini disajikan Diagram analisis IDM Desa Sumber Harapan Tahun 2019



Berdasarkan data terlihat bahwa meski nilai IDM Desa Sumber Harapan masih perlu untuk ditingkatkan utamanya untuk nilai IKE dan IKS. Bahwa nilai IKE desa Sumber harapan adalah 0,6167 yang merupakan poin dengan nilai terendah diantara indikator lain. Sementara nilai IKS juga masih perlu di tingkatkan yakni sebesar 0,7714 masih menunjukkan nilai yang penting untuk dipacu agar terjadi kenaikan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah meski capaian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) Desa Sumber Harapan sudah sangat baik yakni berada pada poin 0,9333, namun juga tetap harus di jaga, dipertahankan serta untuk point tertentu harus ada upaya untuk meningkatkan nilai tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Sambas sesuai dengan kewenangan dalam Pasal 112 dan 113 Undang-Undang nomor 6/2014 dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu melakukan intervensi kebijakan bagi desa-desa agar melahirkan inisiatif pembangunan sektor yang dapat meningkatkan capaian dimensi ekonomi dan Sosial (IKE dan IKS). Intervensi ini perlu dilakukan untuk mendorong percepatan peningkatan point IDM di desa Sumber Harapan.

Menurut Irawan (2017) lahirnya UU Desa memberikan wewenang bagi pemerintah desa untuk berinisiatif memutuskan kegiatan dan anggaran pembangunan, atau pendapat lainnya (Kolopaking 2011) yang menyebutkan bahwa kemandirian masyarakat dan desa ditujukan dengan terbentuknya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan sesuai dengan kondisi dan keperluan desa, membangkitkan kepercayaan dan tanggung jawab masyarakat dan desa untuk berprakarsa memanfaatkan potensi desa bagi pencapaian kesejahteraan.

Pemetaan variabel sebagai turunan masing-masing dimensi memberikan arah tentang program ataupun kegiatan yang dapat diinisiasi pemerintah desa, kabupaten, provinsi bahkan pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan pendapat Setyobakti (2017) yang menyebutkan bahwa IDM dapat digunakan sebagai instrumen atau alat ukur capaian pembangunan desa, sehingga pada indikator mana yang dinilai belum maupun telah tercapai dapat diketahui. Untuk meningkatkan nilai IKE beberapa kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan lokus wilayah desa harus diarahkan pada peningkatan keragaman produksi masyarakat desa, penyediaan pusat pelayanan perdagangan, peningkatan akses distribusi/logistik, peningkatan akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, pembentukan lembaga ekonomi seperti koperasi, serta penyediaan infrastruktur untuk menunjang keterbukaan wilayah seperti pembangunan jalan desa atau penghubung desa dan pemenuhan moda transportasi antar desa.

Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam menunjang kesuksesan ekonomi dan penguatan pemerintah desa di Sumber Harapan dengan penguatan sejumlah faktor yang membantu tercapainya keberhasilan pembangunan suatu wilayah meliputi:

1. Adanya perencanaan yang berorientasi pada kondisi objektif lapangan melalui analisis yang matang dan disesuaikan dengan sosial wilayah,
2. Adanya kontrol dan kepedulian dari semua elemen masyarakat dalam membangun desa.
3. Adanya kesungguhan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan, baik dalam bentuk Fisik maupun non Fisik.

4. Adanya kolaborasi Aparatur Desa dan Masyarakat yang konsekwen dan konsisten mengelola upaya pembangunan dari satu tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan rencana.

KESIMPULAN

Bertolak dari permasalahan yang ada, maka upaya dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan desa adalah :

1. Adapun Potensi Desa sumber Harapan yang bisa dikembangkan berdasarkan analisis peneliti meliputi 2 aspek yakni *pertama* aspek Kerajinan Tenun serta *kedua* Aspek Pertanian dan perkebunan.
2. Adapun upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan potensi desa meliputi:
 - 1) Membangun kapasitas warga, membangun kepedulian dari organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok tani dan usaha di desa untuk peduli pada Desa, serta terlibat dalam perencanaan serta pembangunan desa.
 - 2) Memaksimalkan Kerjasama dengan organisasi-organisasi terkait baik internal maupun eksternal dalam membangun desa.
 - 3) Membangun, mendorong dan menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif yakni melalui penguatan BUM Desa serta lembaga ekonomi masyarakat lainnya seperti Koperasi dan kelompok-kelompok usaha masyarakat baik melalui pembinaan maupun akses permodalan. Membangun fasilitas desa baik fisik maupun non fisik dalam mendorong pertumbuhan budaya, ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antjok, J. 1995. *Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan, dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Adytia Media Yogya-karta.
- Bungin, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group.
- Cook, S., and Steve, M. 1997. *Pemberdayaan yang Tepat*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*, terj. Pepep Sudrajat, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1987.
- Dewanta, A.S. 1996. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Danim, Sudarman, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Friedmann, J. 1992. *Empowerment : the Politics of Alternatif Development*.
- Faturochman, et.al.2007, *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

- Hamidi, Hanibal dkk, *Indeks Desa Membangun 2015*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015.
- Hettne, B. 1982. *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Hulme, D. & M. Turner. 1990. *Sociologi of Development Theories, Politics and Practice*, Harvester Wheatsheaf Hertfordshire.
- Irsan A., S. 1991. *Industri Kecil, Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, Edisi II, LP3ES, Jakarta.
- Kartasasmita, G. 1993. *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*. FIA
- Kurniawan, Borni, *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Khodiyat, Ramaini. 1992. *Kamus Pariwisata dan Perhotelan*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Luthfi, Amir. 1980. *Laporan Pendidikan Agama dan Tradisi pada Masyarakat Limo Koto Kampar Riau*, Lembaga penelitian Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim.
- Mc. Intoch, Hobert. 1972. *Tourism Principles, Practices and Philosophies*. Ohio : Grid Inc. Iim Rogayah Dana Saputra (2 Nov 2009)
- Mubyarto. 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Aditya Medya, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, 1995, *Ekonomi dan Keadilan Sosial (Edisi Kedua)*, Yogyakarta, Aditya Media.
- Mubyarto. (ed.), 1994, *Kewaspadaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Yogyakarta, Aditya Media.
- Neuman, L.W. 1997, *Social Research Method : Qualitative & Quantitative Approach*, Boston : Allyn Bacon.
- Pranarka, AMW dan Prijono, O.S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS, Jakarta.
- Pitana, Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta : CV ANDI
OFFSET
- Prabu Mangkunegara, Anwar. 2000. *Managemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sumodiningrat G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. PT Gramedia, Jakarta.
- Suryanto, *Strategi Akselerasi Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Manifestasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pusat Kajian

Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Nomor : 003/DKK.PN/2017, 2017

Syamsi, I., 1986. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Perencana Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan tingkat Nasional dan Regional*. Rajawali, Jakarta.

Soleh, Chabib (2014) *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.

Schutz, Paul A, et.al, 2004, *Multimethods Research*, University of Georgia, Georgia.

Tukiran, et.al.2007, *Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.

Tjokrowinoto, M. 1993. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. PT Tiara Wacana, Yogyakarta.

Usman, Sunyoto, 2003, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar